

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

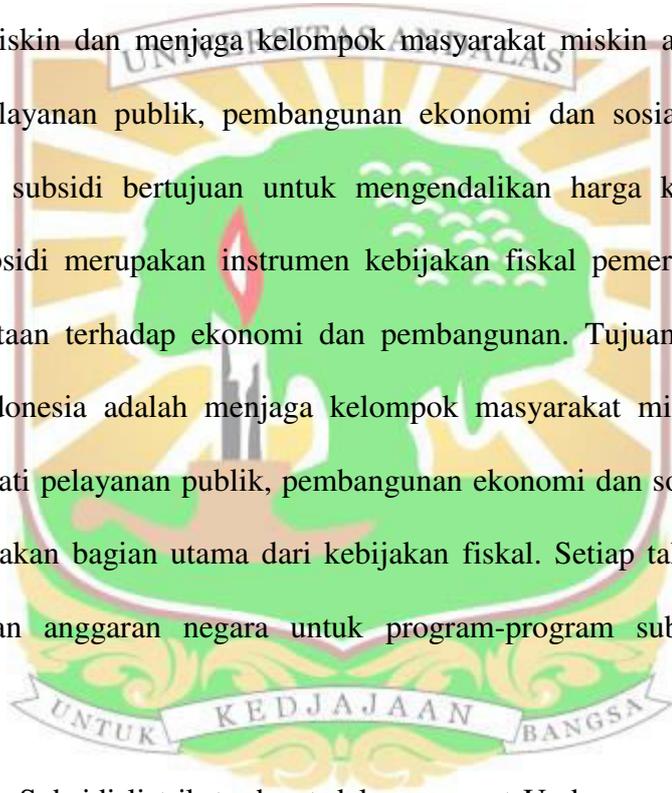
Listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat pada saat ini. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 dinyatakan bahwa negara menguasai hajat hidup orang banyak. Listrik merupakan salah satu kebutuhan hajat hidup orang banyak sehingga perlu diatur dan disediakan oleh negara.

Fungsi PLN adalah memberikan pelayanan ketenaga listrikan bagi masyarakat. Pemerintah memberikan kewenangan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk menjalankan fungsi tersebut sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam penjelasan UU tersebut pasal 66 ayat 1 tentang Kewajiban Pelayanan Umum (KPU) dinyatakan bahwa BUMN dalam hal ini PT PLN (persero) diberikan penugasan khusus oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fleksible, pemerintah harus membirikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin keuntungan yang diharapkan.

Kompensasi yang dimaksud dalam undang-undang tersebut berbentuk subsidi yang diberikan pemerintah kepada PT PLN (Persero). Pemerintah menetapkan harga jual tenaga listrik bagi masyarakat dan membeli tenaga listrik dari PT PLN (Persero) dengan harga keekonomian. Selisih antara harga beli pemerintah terhadap listrik PT PLN (Persero) dengan harga jual listrik kepada masyarakat ditanggung oleh pemerintah sebagai beban subsidi.

Kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi listrik melalui PT PLN (Persero) membawakan konsekuensi beban yang berat dalam APBN. Kemampuan pemerintah untuk berekspansi dengan mengalokasikan anggaran bagi kegiatan yang lebih bermanfaat bagi rakyat semakin berkurang. Hal ini berakibat pada banyaknya kegiatan pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi tidak optimal (Sujai, 2011).

Tujuan utama dari adanya subsidi yaitu untuk meningkatkan konsumsi masyarakat miskin dan menjaga kelompok masyarakat miskin agar tetap dapat menikmati pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan sosial. Pada APBN suatu negara, subsidi bertujuan untuk mengendalikan harga komoditas yang disubsidi. Subsidi merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah Indonesia untuk pemerataan terhadap ekonomi dan pembangunan. Tujuan utama adanya subsidi di Indonesia adalah menjaga kelompok masyarakat miskin agar tetap dapat menikmati pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan sosial. Kebijakan subsidi merupakan bagian utama dari kebijakan fiskal. Setiap tahun pemerintah mengalokasikan anggaran negara untuk program-program subsidi (Mulyani, 2015).



Pemberian Subsidi listrik terdapat dalam amanat Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bahwa masyarakat yang berhak menerima subsidi listrik hanyalah masyarakat tidak mampu. Pada awal tahun 2017 adanya kebijakan baru bahwa adanya kebijakan baru yaitu pencabutan subsidi listrik. Pencabutan subsidi listrik tersebut berdampak pada perekonomian baik secara langsung maupun tidak langsung serta berdampak sosial. Kenaikan tarif dasar listrik merupakan dampak langsung pencabutan subsidi listrik. Pencabutan subsidi

listrik dilakukan pada tegangan listrik yang berdaya mulai dari 900 VA ( Volt Amper) keatas.

Prioritas utama dalam rencana pembangunan negara berkembang (NSB) adalah pembangunan sektor industri. Sektor industri disebut sebagai *the leading sektor* yang mampu mendorong perkembangan sektor-sektor lain, baik itu sektor jasa maupun sektor pertanian (Arsyad, 2010).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peran yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. UMKM memiliki peranan yang juga penting dalam hal penyerapan tenaga kerja. Menurut undang-undang no. 20 tahun 2008 dijelaskan bahwa usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha besar.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang mampu menyerap tenaga kerja, menggunakan sumber daya lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga, UMKM menjadi pilar utama ekonomi di Indonesia (Supriyanto, 2006). UMKM juga berperan dalam proses pemerataan dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (Ismail, 2011).

Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik jumlah usaha mikro sebanyak 58,91 juta unit. Faktor-faktor yang menyebabkan industri kecil dan rumah tangga mampu berkembang pesat adalah: umumnya industri kecil tidak membutuhkan modal yang besar, pekerjaanya

umumnya tidak berpendidikan tinggi, dan bahan bakunya tersedia di dalam negeri, sehingga tidak membutuhkan biaya yang besar. Dengan demikian industri kecil mampu bertahan, meskipun terjadi krisis ekonomi.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan mempunyai peran yang cukup penting dalam membangun perekonomian di Indonesia. Perekonomian di Indonesia secara nasional telah menunjukkan bahwa kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang konsisten dan berkembang. (Marcellina, 2012).

Perkembangan industri kecil di Indonesia, khususnya umkm mengalami perkembangan yang cukup besar. Hal itu juga sama terjadi juga di Sumatera Barat. Ada tiga macam jenis UMKM yang ada di Sumatera Barat, yaitu manufaktur, perdagangan dan jasa. Usaha manufaktur ini adalah upaya aktivitas bisnis yang berperan untuk memproduksi barang (mengubah) barang mentah menjadi barang setengah jadi dan barang jadi. Salah satu contoh manufaktur adalah yang bergerak di bidang konveksi (Putri, 2018).

Batu Taba merupakan salah satu nagari yang terdapat dalam Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Mata pencaharian masyarakat Batu Taba didominasi oleh usaha industri rumah tangga, dalam bentuk pengolahan pakaian jadi atau konveksi. Pada umumnya masyarakat nagari Batu taba menekuni usaha konveksi untuk meningkatkan perekonomiannya.

Konveksi merupakan usaha mikro kecil dan menengah atau orang-orang juga sering menyebutnya industri rumahan. Pada umumnya, pengusaha konveksi mendapatkan pesanan dan jumlah yang besar pada momen-momen tertentu saja, seperti menjelang lebaran, dan pergantian tahun ajaran baru. Spesifikasi ini

memudahkan pebisnis untuk menjalankan sebuah bisnis konveksi agar tetap lancar dan semakin berkembang.

Sebuah usaha konveksi untuk dapat menjalankan usahanya agar dapat berkembang, maka diperlukan biaya produksi, pendapatan. Dalam pengendalian atas biaya produksi adalah pengendalian biaya yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, serta biaya overhead pabrik yang dihitung dengan cara membandingkan biaya yang telah diterapkan dengan biaya yang sebenarnya.

Jika dalam satu hari usaha konveksi dapat menghasilkan omset penjualan yang besar, maka usaha konveksi tersebut mendapatkan laba yang besar dalam penjualan produk yang dimiliki. Semakin bagus kualitas yang dimiliki oleh usaha konveksi tersebut, maka akan semakin banyak yang akan membeli barang yang di produksi di usaha konveksi tersebut dan juga usaha konveksi tersebut akan menghasilkan omset yang besar dari penjualan, sehingga pengusaha konveksi mendapatkan pendapatan yang besar dari hasil penjualan.

Usaha konveksi dalam pengerjaannya membutuhkan pekerja yang berhubungan dengan pengoperasian mesin jahit. Konveksi menghasilkan produk jahitan mulai dari bahan mentah, setengah jadi, hingga produk jadi. Usaha konveksi dalam mempekerjakan tenaga kerja tentu butuh biaya untuk upah tenaga kerja. Tenaga kerja konveksi diberikan upah berdasarkan hasil kerja, jika tenaga kerja konveksi dapat menyelesaikan banyak maka semakin banyak upah yang diterima oleh tenaga kerja konveksi tersebut.

Usaha konveksi pada umumnya menggunakan peralatan yang dominan menggunakan listrik seperti mesin jahit dan juga mesin obras. Banyak penggunaan peralatan yang menggunakan listrik, maka besar biaya yang

digunakan untuk membayar tagihan listrik. Adanya kebijakan baru dari pemerintah yang melakukan pencabutan subsidi listrik maka berpengaruh pada biaya produksi, pendapatan dan upah untuk karyawan. Namun pencabutan subsidi listrik untuk tenaga 900 VA ke atas ditetapkan mulai diterapkan pada bulan Januari 2017 yang tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik PT PLN (Persero) yang mengatur penerapan tarif non subsidi bagi rumah tangga daya 900 VA yang mampu secara ekonomi. Pencabutan subsidi listrik didasari Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dimana, pemerintah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu.

Usaha konveksi merupakan usaha yang bergerak dibidang pembuatan pakaian. Usaha konveksi pada umumnya banyak mengguana peralatan yang menggunakan tenaga listrik. Pada januari 2018 adanya kebijakan baru dari pemerintah yaitu pencabutan subsidi listrik. Pencabutan subsidi listrik yang berdampak pada usaha konveksi yaitu pada biaya produksi dan pendapatan. Oleh Karena itu peneliti mengambil judul “ANALISIS PENGARUH PENCABUTAN SUBSIDI LISTRIK TERHADAP PRODUKSI DI UMKM KONVEKSI DI KABUPATEN AGAM ( Studi Kasus Nagari Batu Taba)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak pencabutan subsidi listrik terhadap biaya produksi pada UMKM?

2. Bagaimana dampak pencabutan subsidi listrik terhadap pendapatan pada UMKM?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dampak pencabutan subsidi listrik terhadap biaya produksi pada UMKM.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dampak pencabutan subsidi listrik terhadap pendapatan ada UMKM.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis, sebagai media untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam penelitian sehingga dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan pada keadaan yang sebenarnya dalam lapangan.
2. Bagi pihak lain, dapat menambah referensi tentang subsidi untuk dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan studi-studi selanjutnya.
3. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan bagi pemerintah guna menetapkan kebijakan dan pengambilan keputusan yang akan diterapkan kepada masyarakat.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan ruang lingkup UMKM yang ada di Kabupaten Agam, khususnya yang berada di Nagari Batu Taba dan penulis tertarik untuk meneliti pengaruhnya pencabutan subsidi listrik terhadap UMKM yang ada di Nagari Batu Taba.

Ruang lingkup penelitian sebagai berikut :

1. Objek penelitian ini adalah usaha konveksi yang ada di Nagari Batu Taba.
2. Responden penelitian adalah pemilik usaha konveksi yang ada di Nagari Batu Taba.
3. Pencabutan subsidi listrik yang berdampak terhadap biaya produksi dan pendapatan pada usaha konveksi.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun sedemikian rupa agar mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah :

#### **BAB 1 : Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan latar belakang mengenai analisis dampak pencabutan subsidi listrik terhadap biaya produksi dan pendapatan UMKM konveksi di Kabupaten Agam ( studi kasus Nagari Batu Taba ). Bab ini juga menjelaskan tujuan dan manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini serta ruang lingkupnya.

#### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini menjelaskan tentang kerangka teori yang digunakan dan temuan empiris yang digunakan. Kemudian ada penjabaran penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, dan diakhir bab ini terdapat hipotesis sementara.

#### **BAB III : Metodologi Penelitian**

Bab ini menjelaskan jenis data yang digunakan serta penjelasan dari permasalahan yang telah dirangkum dalam rumusan masalah bab 1, serta penjelasan analisis yang digunakan dalam penelitian.

#### **BAB IV : Gambaran Umum Daerah Penelitian**

Bab ini menjelaskan tentang kondisi umum daerah penelitian, dan juga keadaan penduduk dan juga usaha konveksi yang ada di Nagari Batu Taba Kabupaten Agam.

#### **BAB V : Hasil dan Pembahasan**

Dalam bab ini memuat hasil dan pembahasan dari analisis data yang telah di teliti serta merumuskan kebijakan apa yang perlu dan bisa di ambil dari penelitian ini.

#### **BAB VI : Penutup**

Bab ini menjelaskan kesimpulan singkat dari penelitian yang telah dilakukan dan juga berisi saran untuk berbagai pihak.

